

**IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA BALAIREJO KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Joko Supriyanto

NPM. 1451010197

Jurusan: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA BALAI REJO KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Kemiskinan sudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat, dengan kata lain telah mengakar luas dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), yang diatur berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimanakah implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo? (2). Bagaimana pandangan Islam tentang implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo dan untuk menganalisis perspektif Islam mengenai program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Sampel dari penelitian ini adalah perangkat Desa, pengurus UPK, dan masyarakat tergabung dalam keanggotaan PNPM MP SPP. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang berjudul implementasi SPP PNPM MP pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam program SPP kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan visi misi awal SPP yang di maktub dalam PTO (Pedoman Teknis Operasional) dalam program PNPM MP. kegiatan SPP sesuai unsur *Syari'at* Islam dalam sistem akadnya baik dari kegiatan awal hingga pencairan dana, hanya saja balas jasa dari pinjaman ini masih dengan sistem bunga pinjaman.

Kata Kunci: Implementasi, PNPM-MP, SPP, Pemberdayaan.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Supriyanto
NIM : 1451010197
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 'Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah' adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 30 Oktober 2019

Penulis,

JOKO SUPRIYANTO

1451010197



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: jalan Let.Kol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Di Desa Balairajo Kecamatan Kalirejo Kabupaten
Lampung Tengah.**

Nama : Joko Supriyanto

NPM : 1451010197

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 7 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak

NIP.19760529200801210

NIP.198903072019032020

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl.Letkol H.Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairajo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.** Disusun oleh : **Joko Supriyanto, NPM : 1451010197,** Program Studi : **Ekonomi Syari'ah,** telah dilakukan dalam sidang Monaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

Tim Penguji

Ketua Sidang : **A. Zuliansyah, S.Si., MM**

Sekretaris : **Ainul Fitri, S.E., M.A.cc**

Penguji I : **Fatih Fuadi S.E.I., M.S.I**

Penguji II : **Hj. Mardhiyah Hayati, SP., M.S.I**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". (Q.S Ar-Rad : 11)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini. Sebagai tanda bukti cinta tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Allah SWT semoga senantiasa meridhoi karya tulis ini.
2. Kedua orangtua , Ayah saya Ngatimin alias Suparno dan Ibu saya Jumirah alias Sumarni yang senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anak-anaknya, mencurahkan kasih sayang tanpa mengenal lelah serta dorongan dalam segala bentuk apapun sehingga bisa mengantarkan saya meraih gelar sarjana.
3. Saudara perempuanku Oktariani yang juga turut mendoakan saya serta memberikan dukungan penuh.
4. Almamaterku tercinta Kampus UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah untuk saya belajar mulai dari kertas putih hingga banyak coretan di atasnya.
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga salah satu tempat menempa ilmu pengetahuan saya.
6. Teman-teman seperjuangan Amir Maaruf, Edi Yuhono, M.Syarifuddin, Tri Widodo, Eko Setiawan dan Lina Fauziah .

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Joko Supriyanto, lahir pada tanggal 31 mei 1995 di Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung, anak pertama dari dua saudara, pasangan Bapak Ngatimin dan Ibu Jumirah. Bertempat tinggal di Dusun satu Balairejo Kec.Kalirejo Lampung Tengah.

1. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Balairejo dan selesai pada tahun 2007.
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Islam 1 Kalirejo kemudian tamat pada tahun 2010.
3. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Ma'arif 1 Kalirejo dan selesai pada Tahun 2013.
4. Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, aktif di kegiatan Ekstra maupun Intra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung,

Joko Supriyanto

NPM.1451010197

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menegaskan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya kejalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat safaatnya dihari kiamat nanti,Amin.

Penulis menulis skripsi ini sebagai bagian dari prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Alhamdulillah dapat penulis selesaikan sesuai rencana. Dalam upaya untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M,Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya terkhusus saya dalam pengajaran yang baik.
3. Hj.Mardhiyah Hayati, S.E.,M.Si. sebagai pembimbing satu yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak sebagai pembimbing dua, yang bersedia memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah ikut memberikan sumbahnya dalam proses belajar saya.
6. Kedua orang tua yang tidak pernah berhenti mencintaiku
7. Bapak Wasito Edi selaku ketua UPK Kalirejo beserta bendahara UPK yaitu Ibu Sumiati S.E. yang memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat- sahabatku yang telah memberikan dukungan dan membantuku dalam setiap perjalanan langkah penelitianku.



Bandar Lampung, Juli
2019

Penulis,

Joko Supriyanto

NPM.1451010197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Identifikasi Masalah.....	12
E. Fokus Penelitian.....	12
F. Rumusan Masalah.....	12
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
H. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi	21
B. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	23
C. Prinsip Dasar PNPM-MP	29
D. Konsep Pemberdayaan	32

1. Pengertian Pemberdayaan	32
2. Strategi Pemberdayaan	35
3. Tujuan dan Sasaran pemberdayaan	40
E. Kajian Terdahulu	42

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Balairejo.....	45
1. Sejarah Desa Balairejo	45
2. Geografi dan Demografi Desa Balairejo	46
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	48
B. Gambaran Umum SPP	51
1. Ketentuan Dasar SPP Ketentuan dasar dalam kegiatan SPP.....	51
2. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP	52
3. Jenis dan Fungsi Kelompok SPP	53
4. Struktur Kelompok SPP	54
C. Data Implementasi SPP.....	55
1. Bentuk Kegiatan SPP dalam Pemberdayaan Ekonomi	57

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	66
B. Pandangan Islam Tentang Implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-nama yang Pernah Menjabat Kepala Desa Balairejo	50
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 3.3 Keadaan penduduk Desa Balairejo Menurut Tingkat Pendidikan .	54
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Balairejo Menurut Mata Pencaharian	55
Tabel 3.5 Jumlah Penggunaan Lahan Desa Balairejo	56
Tabel 3.6 Tabel Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Bergabung Pada Program SPP	73



DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Dokumentasi
3. Pedoman Teknis Operasional (PTO) SPP PNPM MP



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman akan penulis jelaskan dan tegaskan, judul skripsi ini adalah sebagai berikut: “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”

1. **Implementasi** adalah penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”¹
2. **SPP** (Simpan Pinjam Perempuan), penjabaran dari SPP adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan.²
3. **Program PNPM-MP** adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan³.

¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHINGS. 2017) h.19

² Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia. Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2 (2016) : 253-278

³ Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, h. 1.

4. **Pemberdayaan Ekonomi masyarakat** adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*⁴. Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa.⁵

Jadi yang penulis maksud dari judul **Implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat** adalah untuk mengetahui dampak dari program nasional pemberdayaan masyarakat semenjak berjalannya program tersebut terhadap masyarakat di Desa Balairejo.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif

- a. Kehadiran PNMP mandiri pedesaan di Balairejo merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan berbasis pemberdayaan dengan memulai, mengembangkan dan meningkatkan usaha agar dapat membantu pendapatan masyarakat terutama pada program SPP. Namun simpan pinjam yang diberikan PNPM Mandiri pedesaan kepada masyarakat bukan untuk meningkatkan pendapatan kaum perempuan yang digunakan untuk usaha tetapi pinjaman tersebut hanya sekedar pemberian pinjaman.

⁴ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006) h.116

⁵ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), h.4

2. Alasan Subyektif

- a. Tersediannya sumber informasi yang berkenaan dengan masalah tersebut, baik teori maupun yang diperoleh dari lapangan.
- b. Judul ini sangat berkaitan dengan prodi studi yang peneliti ambil, yaitu Ekonomi Islam. Dimana yang menjadi objek kajian penelitian adalah fenomena yang ada di masyarakat yaitu tentang Implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat, dengan kata lain telah mengakar luas dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, semakin memperparah kondisi masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya masyarakat miskin, merosotnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan memang menjadi tema yang sentral dan telah menjadi agenda nasional dari lembaga-lembaga Indonesia. Untuk itu, mereka telah mengucurkan dana dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi dalam perjalanannya, sering sekali dana yang seharusnya dipakai dalam mengatasi masalah kemiskinan, ternyata jatuh ketangan-tangan yang tak semestinya.

Oleh sebab itu, fenomena yang seperti itu perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.⁶ Sumodiningrat mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁷

Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁸

Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), yang diatur

⁶ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h.23.

⁷ G. Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Kedua (Jakarta: Bina Reka Pariwisata, 2006), h. 5.

⁸ Irawan Dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Keenam, Cet. Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 308.

berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri⁹.

PNPM-MP ini diluncurkan pemerintah guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kegiatan pengimplementasian bantuan dalam PNPM-MP dilkat dalam forum masyarakat dilaksanakan oleh UPK (Unit Pengolah Kegiatan) dimana suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam forum musyawarah antar Desa. UPK bertanggungjawab terhadap forum musyawarah antar desa sebagai wakil masyarakat sekecamatan, dan mensukseskan kegiatan PNPM. Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan¹⁰

Pada PNPM MP ini, terdapat beberapa program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir bagi kaum perempuan, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pada prinsipnya, PNPM-

⁹ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, http://www.pnpm-mandiri.org/perpustakaan/buku/PNPM_Mandiri_Info_Kit_2012 (diakses pada tanggal 2 april 2019 pukul 23.37)

¹⁰ Firmanzah. *"Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketeing Politik"*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).h.290

MP SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung dan merealisasikan hal diatas maka pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan.

Seiring dengan pelaksanaan PNPM-MP, Desa Balairejo merupakan salah satu yang menjadi target dari PNPM-MP, yang terletak di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan kehadiran PNPM-MP, kemampuan akan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dapat semakin membaik sehingga dapat berpengaruh terhadap ekonominya. Di Desa Balairejo telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk didalam PNPM itu sendiri, salah satunya adalah PNPM-MP yang disebut kegiatan simpan pinjam perempuan(SPP) dan program ini bertujuan membantu kaum perempuan miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank. Diharapkan dapat membantu kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian keluarga miskin¹¹.

¹¹wawancara dengan Bapak Edi, selaku ketua pelaksana kegiatan pada tanggal 24 april 2018.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program di desa Balairejo. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator PNPM-MP SPP secara konsisten dan terbuka. Pemantauan yang memadai terhadap kinerja program diperlukan agar dapat melakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri SPP. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan atau dikembangkan di daerah lain. Jika ternyata program buruk dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan telah berjalan selama 12 tahun di Desa Balairejo dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya dilihat dari data perkembangan kelompok SPP semakin meningkat yaitu pada tahun 2015 terdapat 19 kelompok meningkat pada tahun 2018 terdapat 23 kelompok hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumiati selaku bendahara UPK, bahwa tingkat pengembalian SPP Desa Balairejo berjalan dengan baik. Jika program ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya menunjukkan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program ini dapat menjadi program unggulan yang terus didukung didalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Namun dalam hal meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin program ini belum mencapai sasaran yang tepat.¹²

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya masyarakat miskin di Desa Balairejo selama empat tahun terakhir, dari data yang didapatkan dari Bapak Bahrul selaku Sekretaris Desa, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel I
Tingkat Kemiskinan di Desa Balairejo

Tahun	2015	2016	2017	2018
RT Miskin	372 KK	405 KK	417 KK	433 KK

Sumber: Data Monografi Desa Balairejo

Masyarakat miskin di Desa Balairejo pada tahun 2015 berjumlah 372 KK meningkat pada tahun 2018 menjadi 433 KK sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Desa Balairejo justru meningkat, hal ini dapat diidentifikasi oleh keadaan ekonomi masyarakat yang menurun. Karena saat ini orang yang memiliki usaha sudah semakin banyak dan persaingan antar pedagang semakin meningkat sehingga pendapatan pedagang semakin menurun.¹³

Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam sangat memahami kebutuhan penganutnya, tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk

¹² Unit Pengelolaan Kegiatan. “Laporan Keuangan UPK-PNPM per Desember 2014 dan 2017”. Sekretariat UPK Kalirejo

¹³ Hasil wawancara pra riset dengan Bapak Bahrul selaku Sekretaris Desa Balairejo ,tanggal 24 april 2018

melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayanyaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Kebijakannya harus berlaku menyeluruh tanpa berpihak pada suatu golongan tertentu, baik itu golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Hal itu bertujuan supaya tidak ada suatu golongan yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Allah SWT juga telah memberikan perintah kepada setiap orang untuk berlaku adil yang disebutkan dalam firmanNya yaitu surat al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menggunakan indikator kemiskinan rumah tangga.¹⁴ Dalam kehidupan nyata seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan

¹⁴ Ana Zahrotun Nihayah, Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.5.No. 2. Tahun 2015).

bergantung dengan hasil pendapatan suami. Peran perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan.

Jika pada suatu wilayah distribusi hasil pembangunan cukup merata maka hal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, penduduk miskin diidentikan dengan penduduk yang pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan.¹⁵ Tentu kita tidak dapat memaklumi masalah ini. Bagaimana tidak, problema kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa memunculkan masalah sosial yang amat dahsyat. Katakanlah misalnya, akan semakin tingginya tingkat kriminalitas. Karena itu, bagaimanapun problema ini harus dituntaskan sedini mungkin. Diperlukan langkah yang secara simultan dalam menanggulangi kedua problema ini. Langkah-langkah tersebut dapat dimulai dengan mengintegrasikan target dan program ke dalam rencana yang lebih sederhana dan singkat. Kemudian kita perlu jujur dan cerdas dalam menjalankan setiap program yang sudah kita rencanakan.¹⁶

Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai lebih efektif,

¹⁵ Ninik Sudarwati. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia 2008), h.16

¹⁶ Teguh Imam Rahayu. Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN : 2302-2752, Vol. 6 No. 1, 2017. h.144

karena masyarakat dianggap lebih mengetahui segala permasalahan yang dihadapi pada desa masing-masing.¹⁷

PNPM MP adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.¹⁸

Sementara, berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam kegiatan simpan pinjam PNPM-MP ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: (1) Kegiatan simpan pinjam belum menerapkan pertimbangan yang obyektif; (2) Belum semua sasaran kelompok orang miskin dapat terjangkau (3) Kurangnya kepercayaan antara sesama pelaku PNPM, oleh karena itu penulis tertarik menulis judul “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Belairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”

D. Identifikasi Masalah

¹⁷ Ana Zahrotun Nihayah. *Ibid* h.4

¹⁸ *Ibid*

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Pemerintah dalam mengentas kemiskinan menciptakan suatu program PNPM-MP yang diberdayakan melalui SPP (simpan pinjam perempuan) yang diharapkan dapat membuat masyarakat hidup sejahtera lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya atau lebih tetapi pada kenyataannya di Desa Balairejo Penerapan/ implementasi PNPM-MP kurang maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pemahaman anggota tentang penerapan simpan pinjam yang dilaksanakan melalui program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam memberdayakan perekonomian yang ada di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan pada penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, agar penelitian terarah dan terfokus, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo?

2. Apa pandangan islam tentang implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Belairejo?

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan analisis program tersebut:

1. Untuk menganalisis implementasi SPP (simpan pinjam kelompok perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Belairejo.
2. Untuk menganalisis apa pandangan islam tentang implementasi SPP (Simpan Pinjaman Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan. Secara terperinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perekonomian, karena penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja program tersebut karena dari penelitian ini dapat memberikan keterangan berupa hal

yang mendukung keberhasilan yang dapat diterapkan untuk menjadikan program ini menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Tentunya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berperan dalam berjalannya program tersebut yaitu bagi Pemerintah dan Masyarakat.

H. Metode Penelitian

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana dengan objektif dan ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal. Maka sangat diperlukan rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir ilmiah yang disebut dengan metode-metode dalam suatu penilain merupakan hal yang sangat bermakna, sebab dengan adanya metodologi akan memperlancar penelitian. Berkenaan dengan masalah metodologi penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa hal.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fileld research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian.¹⁹ Penelitian dilapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan PNPM-MP SPP di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 185.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardalis, bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak dinas terkait dan masyarakat yang mendapatkan bantuan PNPM-MP SPP di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku,

²⁰Rony Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), h. 43.

jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.²¹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Namun sebenarnya dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.²² Populasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah seluruh anggota yang tergabung di dalam PNPM-MP Desa Balairejo yang terdiri dari 23 Kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 15 anggota yang keseluruhannya berjumlah 150 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobabilitas sampling*., Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. menurut Suharsimi Arikanto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di

²¹*Ibid*, h. 42.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.215

ambil semua, selanjutnya jika populasinya besar diambil antara 10-15% atau 20-25%.²³

Maka sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1	Sawit 1	12
2	Melati 3	7
3	Coklat	5
4	Niaga Jaya	6
JUMLAH		30 Anggota

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya.

Dalam penelitian ini, mengamati kegiatan para anggota atau petugas Unit Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan terkait

²³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 45

PNPM serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yang berada di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin yakni proses wawancara tanya jawab yang digunakan daftar pertanyaan akan tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diuji. Adapun yang menjadi sumber informasi adalah Ketua sekretaris bendahara dan sekertsris dalam anggota PNPM-MP di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data

²⁴Husein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63.

sekunder yang memuat informasi tertentu mengenai pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balairejo dan Laporan Keuangan UPK.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁵

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, pada PNPM-MP di Desa Balairejo. Dengan demikian

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246

data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁶

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the best has been narrative text*". Yang sering digunakan untuk penyajian data dan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁷

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

²⁶*Ibid*,h.247

²⁷*Ibid*,h.249

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁸



²⁸*Ibid*,h.252

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa merupakan suatu proses penerapan ide, program atau tatanan kedalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.¹

Menurut Harsono mengemukakan Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.² Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan atau menjalankan suatu program agar terciptanya akhir suatu kegiatan yang baik. Dalam hal ini dilakukannya implementasi pada suatu program sangat berperan dalam terciptanya.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*.³ Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci

¹ Razak, Intan Abdul. *Trategi Pembelajaran Dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, (Yogyakarta: CV Budi Utama). 2012, h,37

² Guntur Setiawan, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: Kencana, 2007), h. 39.

³*Ibid*, h.42

kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui: implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan serta pengendalian.⁴

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci, maka implementasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

Pada konsep implementasi, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.⁵

⁴*Ibid*, h.42

⁵ Edi Suharto, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

⁶*ibid*, h. 97.

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan program ini dengan visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.⁷

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.⁸

⁷ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 2014, h. 1.

⁸ *Ibid*, h. 2.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.⁹

Salah satu jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah SPP. Yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ PTO Penjelasan IV, Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta. 2014, h. 58.

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkannya kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia.

Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan umum Secara umum

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Tajwid, h. 106.

kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.¹²

b. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan Dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas ekonomi masyarakat pedesaan.

¹²M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), h. 12

5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.¹³

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dapat membantu para perempuan-perempuan rumah tangga dibidang usaha membantu perekonomian keluarga apalagi jika usaha tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian pokok dalam keluarganya.

Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi para perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharingpower*, penetapan kemampuan dan penetapan kewenangan.¹⁴ Pemberdayaan pada kegiatan simpan pinjam ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Menurut Parrons yang dikutip dari buku Anwas, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁵ Selanjutnya menurut Ife dari buku yang sama, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada

¹³*Ibid*, h. 14.

¹⁴Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo 2010). h. 29.

¹⁵ Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49

masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.¹⁶

Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam yang notabennya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat sesuai konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan padaparagraf di atas. Dengan melihat pentingnya peran program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) pada masyarakat desa, penerapan kegiatan ini seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa tersebut. Pembagian yang merata terhadap permodalan yang dilakukan menjadi tolak ukur dalam menjalankan program ini sesuai dengan tingkat keperluan permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa khususnya di Desa Pematang Tengah ini demi membantu mensejahterakan para keluarga yang sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.

C. Prinsip Dasar PNPM-MP

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

¹⁶Ibid, h. 50

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

2. Otonomi.

Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.

3. Desentralisasi.

Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi terhadap masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

5. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat.

Pengertian prinsip partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil.

6. Kesenjangan dan keadilan gender.

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan di dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7. Demokratis.

Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

8. Transparansi dan akuntabel.

Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

9. Prioritas.

Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan pengentasan kemiskinan.

10. Keberlanjutan.

Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

11. Kolaborasi.

Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.

12. Sederhana.

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

D. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (tidak mencapai suatu maksud, pemecahan persoalan, mencari jalan keluar).¹⁷ Pemberdayaan dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, proses pemberdayaan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata *Power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan adalah

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 121.

pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*Powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang ditempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *Power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang berdaya.¹⁸

Pemberdayaan menurut Kartasmita adalah upaya untuk membangun daya yang ada pada individu atau masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya. Pengertian pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan atau dapat pula disamakan dengan istilah pembangunan.¹⁹

¹⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2013), h. 72.

¹⁹ Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja & Rosdakarya, 2008), h. 42.

Sulistiyani menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Sedangkan indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal yaitu sebagai ukuran drajat pemberdayaan²⁰

- 1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*Power To*)
- 2) Tingkat kemampuan meningkat kapasitas untuk memperoleh akses (*Power Within*)
- 3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*Power Over*)
- 4) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*Power With*)

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan

²⁰ Hairi Firmansyah, *Ketercapaian Indikator Keberdayaan asyarakat dalam program Pemberdayaan fakir miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin*, Jurnal Agribisnis Perdesaan, Vol 02 No. Juni 2012

kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kesejahteraannya.²¹

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi sering kali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, lingkungan serta aspek lainnyayang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapantahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik.

2. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material. Sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya, guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan,

²¹ *Ibid.* h.44.

terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sutrisno menjelaskan dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda diantara para ahli, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator.

Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo menyebutkan ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan).
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
- e. Bertanggung jawab atas tindakannya.²²

Diatas menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani

²² Hany Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2005), cetakan ke-2, h. 8.

mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, namun pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen perubahan dapat melakukan pendekatan *Bottom-up*, dengan cara mengenali potensi masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas.

Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu: Pemukiman, Penguatan, Perlindungan, Penyokong dan Pemeliharaan.

Menurut Chamber dikutip oleh Anwas, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan.²³ Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas di lapangan, seperti: pegawai kelurahan desa, penyuluhan, guru, dosen, pegawai puskesmas, dokter, bidan dan profesi lapangan lainnya. Petugas non formal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola dalam suatu lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal diantaranya: relawan pekerja sosial, kader PKK, kader posdaya, mahasiswa, ulama, simpatisan, dan yang lainnya.²⁴ Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku untuk menuju kearah kemandirian (berdaya).

Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, petugas yang memberdayakan individu

²³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24

²⁴ Suderman M, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), h. 207.

dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebutkan sebagai agen pemberdayaan (*agent of empowerment*).²⁵

3. Tujuan dan Sasaran pemberdayaan

pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, merubah perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut, tampak ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya, dalam hal ini adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralsir belenggu-belenggu sosial yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat

²⁵*Ibid.*,h. 185

mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat dan kedua pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuan dari sikap hidupnya.

Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana menguraikan tentang sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan.
- d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lebih lanjut Talizuduhu Ndrana berpendapat bahwa keempat sasaran pemberdayaan masyarakat diatas yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, pembangkitan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri melainkan diusahakan agar satu berkaitan dengan yang lainnya.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu:

Yulihardi berjudul “Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman” Penelitian yang digunakan metode kualitatif, Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang program dan individu tersebut secara holistik (utuh). Hasil penelitian ini adalah Sosialisasi Program PNPM-MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umumnya dan khususnya anggota kelompok, Pelaksanaan Program PNPM-MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pelaksanaan penyaluran dana bergulir yang dapat membantu untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ternyata tidak tercapai secara maksimal terlihat dari peminjaman oleh responden yang merupakan rumah tangga miskin (RTM) hanya 70,0%, sementara non RTM 30,0%.²⁶

Teguh Imam Rahayu, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, hasil dari penelitian ialah Pelaksanaan program PNPM yang ada di Kecamatan Sayung memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar sekali terhadap masyarakat di Kecamatan sayung, baik manfaat yang langsung maupun

²⁶ Yulihardi. Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Pnpm-Mp Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2 (146 - 160)

manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa yang mendapatkan program tersebut.²⁷

Ardiyati, “Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok”, penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap informan (1) Penanggungjawab Operasional Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Pajangan, (2) Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan/UPK (ketua, sekretaris, bendahara, pendamping lapangan), (3) Badan Pengawas UPK (BPUPK), (4) kelompok-kelompok SPP yang juga diberikan pertanyaan survey. Metode kuantitatif dilakukan melihat efektivitas implementasi kegiatan. Hasil dari penelitian ini ialah kegiatan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha meningkat dari buruh menjadi memiliki usaha.²⁸

²⁷ Teguh Imam Rahayu, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN : 2302-2752, Vol. 6 No. 1, 2017

²⁸ Teguh Imam Rahayu, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6 (1) (2018: 91-99)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzat. 2010
- Anwas ,Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketeing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Hikmat ,Hany, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat cetakan ke-2*, Bandung: Humaniora Utama Press. 2005.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju 2012.
- Kountur Rony, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Adtya Media.2005.
- M.Suparnoko dan Irawan, *Ekonomika Pembangunan, Edisi Keenam. Cet. Kedua*, Yogyakarta: BPFE,2008.
- Ninik Sudarwati. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Intimedia. 2015
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.2014.
- PTO Penjelasan IV: *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta.2014
- PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta.2014
- Rahmat, Syafei. *Fiqh Muamalat* Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.2006

- Razak, Intan Abdul. *Trategi Pembelajaran Dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.
- Rony Kountur, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Sudarwati Ninik, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Intemedia. 2008
- Suderman M, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, .Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2014.
- Suharto Edi, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sumodinigrat G. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, Edisi Kedua*.Jakarta:Bina Reka Pariwara. 2006.
- Tuasikal ,M. Iqbal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP 2012.
- Umar husein, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, edisi 11, Jakarta: PT raja grafindo persada. 2013.
- Unit Pengelolaan Kegiatan. “ *Laporan Keuangan UPK-PNPM per Desember 2014 dan 2017*”. Sekertariat UPK Kalirejo.
- Wrihatnolo ,Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, .Jakarta: PT elex Media Komputindo. 2010.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Pernada Media Group. 2013

B. Jurnal

- Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING).2017.
- Ana Zahrotun Nihayah, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reducation Dalam*

Perspektif Ekonomi Islam, (*Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol.5.No. 2. Tahun 2015).

Firmansyah Hairi, *Ketercapaian Indikator Keberdayaan asyarakat dalam program Pemberdayaan fakir miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin*, Jurnal Agribisnis Perdesaan, Vol 02 No. Juni 2012

Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia. Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2 (2016) : 253-27.

Rahayu ,Teguh Imam, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” Serat Acitya – *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN : 2302-2752, Vol. 6 No. 1, 2017

Teguh Imam Rahayu, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6 (1) (2018: 91-99.)

Yulihardi. Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Pnpm-Mp Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2 (146 - 160). Tahun 2017.

C. Sumber Online

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, http://www.pnpm-mandiri.org/perpustakaan/buku/PNPM_Mandiri_Info_Kit_2012 (diakses pada tanggal 2 april 2019 pukul 23.37)